

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
MUR ARIPIN
NIM. E01111062

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Pontianak Tahun 2016

Email: murarifin5r3@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Komunikasi Kepala Dinas Pariwisata pada Bidang Pariwisata kurang maksimal sehingga promosi Wisata Bahari Pantai Pulau Datok tidak terlaksana dengan optimal, Sumber daya yang menempati posisi kerja tidak sesuai dengan standar keahlian, Tidak adanya komitmen yang maksimal untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 tahun 2010, Mekanisme (belum maksimal berjalanya Standar Oprasional Prosedur) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang menyebutkan terdapat empat aktivitas dalam Hasil Implementasi yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Perilaku, Struktur Birokrasi. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata DISBUDPARPORA di Kabupaten Kayong Utara masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dijalankan DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara, terkait dengan Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum berjalan secara baik. Selain itu kepemilikan lahan Wisata yang masih dimiliki individu yang menjadi kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok. Saran dari hasil penelitian ini Komunikasi tidak hanya sebatas antara Kepala Dinas dan Kasinya saja tetapi melibatkan pihak terkait seperti Kecamatan Sukadana dan desa sutera yang merupakan wilayah Wisata tersebut, mengupayakan bagaimana menarik investor agar menanam modal di wisata tersebut, adanya kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKD dalam komitmen pengembangan wisata tersebut, memberi keterangan atas kejelasan tentang alur proses kerja tanggung jawab dan staf

Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kepariwisata, komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Abstract

The problem in this research are: Communication the head of tourism department in the field of tourism was less maximal that promotion of nautical tourism Pulau Datok Beach was not performing optimally, resource keep working position is not in accordance with the standards of expertise Lack of maximum commitment to implement the District Regulation in Kayong Utara Numbers 27, 2010. the mechanism (not maximum the processed of standard oprasional procedure) in the implementation of Kayong Utara District Regulation Number 27 of 2010 Implementation of Tourism Business District of Kayong Utara. The researcher used the theory of George C. Edward III who says there are four activities in the implementation of the outcome Communications, Resource, Disposition or Behavioral , Bureaucratic Structure. this thesis writing used descriptive method with qualitative approach. The results showed that the Implementation of Regional Regulation Numbers 27, 2010 regarding business

tourism in the district of Kayong Utara DISBUDPARPORA still not optimal. This is evidenced by standard operational procedure (SOP) run DISBUDPARPORA District of Kayong Utara, related to the management of Marine Tourism Pulau Datok Beach by the Department of Tourism Culture Youth and Sports has not run well. Besides the ownership of land is still owned individual travel is a constraint in the Construction and Development of Marine Tourism Pulau Datok Beach. Suggestions and the purpose from this research are communication is not only limited to the heads of departments and the manager only but involve relevant stakeholders such as township and village which is a region of tourist, seeking how to attract investors to invest in the tourism, cooperation with the Department of Fisheries and Marine and also DPPKD to commit the development of tourism, comments upon the clarity of the work processes and staff responsibilities

Keywords: Implementation, Policy, tourism, communication, resources, disposition, Bureaucratic Structure.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan industri terbesar pada abad ini, Pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam sektor ekonomi berbagai wilayah dengan cara mengenalkan tempat wisatanya pada berbagai media kepada wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah yang bersangkutan termasuk Kalimantan Barat, dapat dikembangkan sebagai aktifitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat. Sebagai sektor multisektoral, pariwisata berada dalam suatu sistem besar yang komponennya saling terkait antara satu dengan yang lain. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata bahkan sudah menjadi salah satu *prime mover* didalam perubahan sosial budaya terutama didaerah tujuan wisata.

Pariwisata berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai banyak potensi alam dan seni budaya yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai produk wisata oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kemudian provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan daerah-daerah tujuan wisata yang potensial dalam rangka memajukan pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Barat.

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, dimana Ibukota Kabupatennya terletak di Sukadana, Didalam peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1996

tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan. Dan dalam peraturan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara No 27 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan. Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa serta fasilitas lainnya bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, selanjutnya ayat 9 usaha daya tarik wisatawan adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, budaya, dan wisata buatan manusia, ayat 11 usaha jasa transportasi wisat adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, dan ayat 19 usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronok. Peraturan daerah ini dibentuk dengan asas dan tujuan, penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas manfaat, asas kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Tujuan dari peraturan daerah ini dimaksudkan memperkenalkan, mendayagunakan,

melestarikan dan meningkatkan mutu objek pariwisata dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluaskan dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pendayagunaan produksi nasional. Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Sejarah. pariwisata di Kabupaten Kayong Utara sampai saat ini belum menunjukan hasil sebagaimana diharapkan dan belum mampu menjadi salah satu daya dorong dalam uapaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu tantangan pariwisata di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2013-2017 adalah meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembanngunan. Tantangan tersebut dihadapkan dengan semakin ketatnya persaingan antara daerah Kabupaten/Kota dalam menciptakan distnasi wisata yang mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun nasional. Disamping itu tantangan dari dalam adalah belum siapnya distnasi wisata daerah Kabupaten Kayong Utara untuk bersaing dengan daerah lain serta masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta

profesionalisme sumberdaya manusia pariwisata dalam bersaing ditingkat daerah.

Manfaat teoritis Menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, Administrasi Negara Khususnya dalam kajian Kebijakan Publik pada hasil implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. dan menfokuskan hasil implementasi peraturan daerah No 27 Tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Kayong Utara. Dan Memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata khususnya pada Bidang Pariwisata supaya bisa mengimplementasikan Peraturan Daerah No 27 Tahun 2010 Usaha Kepariwisata dapat lebih maksimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Carl Friedrich (dalam Winarno, 2014:20) memandang kebijakan sebagai "suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu maksud tertentu".

Selanjutnya James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan publik, yaitu "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan". Dari dua definisi yang mengemukakan mengenai kebijakan publik, dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian usulan kegiatan yang dibuat kemudian diusulkan untuk dilaksanakan bertujuan tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

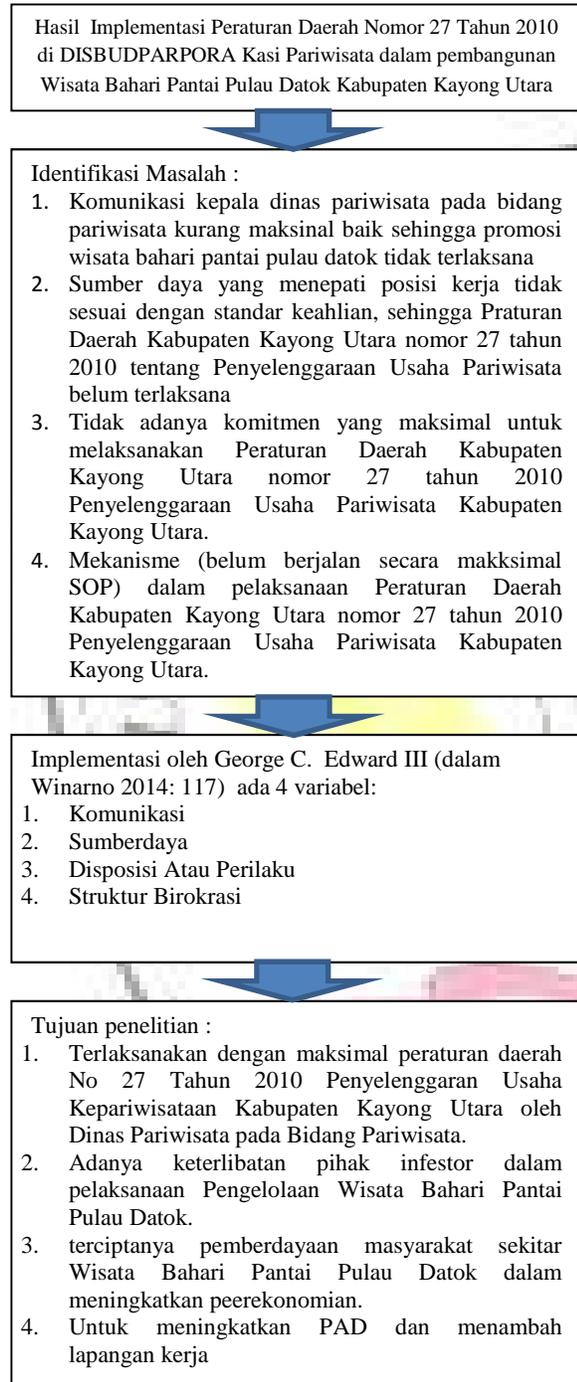
Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah "apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)".

3. Proses Implementasi

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah "apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*),

atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomenayang terjadi dengan hasil data dilapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Maret 2015 hingga April 2016. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposiv* dengan Subjek penelitian Kepala Dinas DISBUDPAPORA, Kasi Pariwisata, Camat Sukadana, Kepala Desa Sutera dan teknik *aksidental* subjeknya Wisatawan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik Bogdan (dalam Sugiyono, 2010: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan penyusunan secara sistematis data yang ddiperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil implementasi sebuah kebijakan, menurut para ahli mengidentifikasi berbagai aktivitas yang mempengaruhi hasil implementasi sebuah kebijakan pada peraturan daerah no 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III (dalam Winarno 2014:117) yaitu menunjuk bahwa kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*) Berikut pernyataan kepala DISBUDPARPORA Drs. Mas Yuliandri selaku Kepala DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pekerjaan atau tugas, kantor kami selalu didasarkan dengan peraturan yang ada pada peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan. dalam bidang atau kasi tentu mempunyai tugasnya masing-masing dan mempunyai tanggung jawab masing-masing yang saya serahkan kepada kepala kasinya. seperti itulah komunikasi yang kami laksanakan, Wisata Bahari Pantai Pulau Datok, kami

mempunyai tujuan untuk menjadikan wisata menjadikan wisata bertarap internasional.”

Lebih lanjutnya informasi tentang komunikasi dari kepala dinas ke kasi pariwisata maka peneliti mewawancarai dengan tema yang sama ke kepala kasi Pariwisata Bapak Ari Artiyani SE selaku kepala kasi Pariwisata

“wisata yang ada di KKU ini kami selaku kasi pengelolanya, dan ini juga berdasarkan kewenangan dan peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang di limpahkann oleh kepala DISBUDPARPORA kepada kasi pariwisata dengan sebagaimana asas dan tujuanya., saya sebagai kepala kasi Pariwisata yang mengelola berbagai wisata yang ada di KKU ini, Dengan tugas pokok meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di KKU dan impian kami yang ingin dicapai pada tahun 2016 nanti menjadikan wisata bahari pantai pulau datok dan wisata-wisata yang ada di KKU ini sebagai salah satu tujuan wisatawan baik local maupun luar dengan wisata bertarap internasional”

Komunikasi pada kepala DISBUDPARPORA ke kasi Pariwisata ini merupakan komunikasi yang berkaitan wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala DISBUDPARPORA ke kasi Pariwisata

dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan melalui program-program yang dibuat oleh kasi Kariwisata dalam meningkatkan kualitas pariwisata Wisata bahari pantai pulau datok maupun wisata yang ada diseluruh Kabupaten kayong Utara.

2. Sumber Daya

Sumber daya menurut George C. Edward III (dalam Winarno 2014:117) yaitu peneunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Mas Yuliandri selaku kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara terkait dengan pertanyaan Apaka sudah sesuai penempatan kerja pada staf khususnya di kasi pariwisata dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam pembangunan wisata baharri pantai pulau datok, sebagai pelaksana kebijakamn berikut adalah hasil kutipan wawancaranya:

“penempatan di posisi kasi pariwisata yaitu Ari Artiyon SE, Sudah sesuai karena beliau lulusan sarjana ekonomi, dan beliau juga

mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dan ini dibuktikan pada wisata bahari pantai pulau datok ini, dahulu merupakan wisata yang dikelola oleh Kabupaten Ketapang, karena dulu belum memisahkan diri dari kabupaten kayong utara dari kabupaten ketapang dan wisata bahari pantai pulau datok ini belum ada perkembangan, dan sekarang setelah dikelola DISBUDPARPORA tentunya Kasi Pariwisata mengalami perkembangan karena melalu pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung seperti adanya wahana permainan banana but sehingga wisatawan lebih meningkat dari sebelumnya”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala DISBUDPARPORA bapak Drs, Mas Yuliandri dengan pertanyaan : Apakah pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam pembangunan wisata bahari pantai pulau datok, berikut adalah hasil kutipan wawancaranya:

“pembiayaan wisata yang ada di KKU ini kami menggunakan anggaran APBD murni termasuk pembiayaan wisata bahari pantai pulau datok tanpa adanya pihak ketiga atau swasta

Selanjutnya peneliti mewawancarai kasi Pariwisata DISBUDPARPORA bapak

Ari Artiyani SE dengan pertanyaan yang sama:

“soal pembiayaan wisata pantai pulau datok ini kami menggunakan APBD murni tanpa campur tangan pihak swasta ini berlaku semua wisata yang ada di KKU”

3. Disposisi

Disposisi menurut George C. Edward III (dalam Winarno 2014:117) (kecendrungan) komitmen Implementor Dalam Kebijakan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pengaruh disposisi atau kecendrungan-kecendrungan dalam implementasi kebijakan menimbulkan suatu akibat-akibat yang nyata terhadap implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di DISBUDPARPORA.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pertanyaan Bagaimana komitmen dalam pelaksana peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 dalam pembangunan wisata bahari pantai pulau datok khususnya kasi pariwisata, kepala DISBUDPARPORA bapak Drs. Mas Yuliandri tentang sosialisasi seminar pariwisata seluruh KKU yang dilakukan oleh kasi Pariwisata yaitu:

“komitmen DISBUDPARPORA ini bedasarkan visi kami, yaitu memantapkan KKU sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis Eko wisata dan Budaya serta terwujudnya masyarakat yang berbudaya, sehat jasmani dan berprestasi.dan ingin menjadikan wisata yang ada di KKU ini menjadi wisata yang bertarap internasional”

Selanjutnya peneliti mewawancarai kasi Pariwisata bapak Ari Artiyani,SE dengan pertanyaan yang sama berikut kutipanya:

“komitmen kami selaku pengelola wisata bahari pantai pulau datok akan menjadikan wisata bahari pantai pulau datok ini menjadi wisata yang bertarap internasional, tetapi kami mempunyai kendala dalam pengelolaan ini seperti kepemilikan wilayah wisata bahari ini masih dimiliki individu dan anggaran untuk membangun masih mengandalkan APBD”

Komitmen DISBUDPARPORA dalam pengelolaan wisata bahari pantai pulau datok ini sesuai dengan visi dan misinya dan menjadikan wisata bahari ini menjadi wisata yang berbasis internasional pada tahun 2016 Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala DISBUDPARPORA bapak Drs, Mas Yuliandri dengan pertanyaan : Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas wisata bahari pantai pulau datok ini dalam pelaksanaan peraturan

daerah nomor 27 tahun 2010 tentang usaha kepariwisataan ini, berikut adalah hasil kutipan wawancaranya:

“kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi Pariwisata DISBUDPARPORA yaitu berbagai program seperti, seminar pariwisata, program sadar akan pariwisata kepada kelompok-kelompok yang membuat komunitas pariwisata pada pencinta alam dan perbaikan fasilitas wisata seperti jalan tempat-tempat santai wisatawan kursi pantai dan home stay”

Pertanyaan yang sama peneliti mewawancarai kasi pariwisata DISBUDPARPORA bapak Ari Artiyana, SE berikut kutipannya :

“kegiatan-kegiatan kami untuk meningkatkan kualitas wisata bahari pantai pulau datok maupun wisata yang ada diseluruh KKU ini seperti sosialisasi sadar akan pentingnya wisat dan seminar-seminar yang mengenai wisata, dan pelatihan kerajinan khas daerah, meskipun kegiatan kerajinan khas daerah ini dilaksanakan pas ada iven saja, kami sudah menyiapkan tempat pelatihanya yaitu terdapat di pantai pulau datok yang bernama grai kerajinan daerah khas kayong utara”

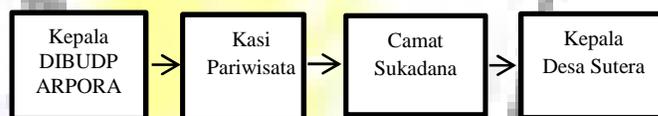
Disposisi pada komitmen program-program yang dilaksanakan oleh DISBUDPARPORA oleh kasi Pariwisata adalah kegiatan yang dilaksanakan seperti

seminar, promosi dan sosialisasi sadar akan wisata ini merupakan program untuk meningkatkan mutu wisata yang ada dan memperkenalkan wisata pada masyarakat bahwa wisata itu perlu karena bias meningkatkan PAD daerah selain itu juga bias menambah lapangan kerja masyarakat sekitar wisata tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut George C. Edward III (dalam Winarno 2014:117) mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenag, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar..

Struktur antar Unit-Unit Organisasi



Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam Implemtasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong utara. Dalam menjalankan kegiatannya, DISBUDPARPORA

Bagaimana pelaksanaan SOP (standar oprasional prosedur) dalam peraturan daerah nomor 27 tahun 2010

tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam pembangunan wisata bahari pantai pulau datok, dengan Bapak Drs. Mas Yuliandri selaku Kepala DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pekerjaan, kantor kami selalu didasarkan dengan peraturan yang ada. Tentunya kami punya SOP yang menjadi dasar panduan pekerjaan kami dan berkerja sesuai dengan SOP tersebut. Kami kelola diDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini bukan khusus untuk wisata saja tapi, tapi seperti Kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan Olahraganya yang memiliki SOP yang berbeda-beda pada setiap kasinya.”

Lebih lanjutnya informasi tentang SOP (*standar oprasional prosedur*) maka saya melakukan wawancara dengan kepala kasi Pariiwisata dengan Bapak Ari Artiyani SE selaku kepala kasi Pariwisata, dengan pertanyaan yang sama:

“dalam pelaksanaan kinerja kami memiliki standarnya yaitu berdasarkan SOP (standar oprasional prosedur) dalam pengelolaan wisata yang ada di KKU termasuk wisata bahari, dari beberapa tahap kerja yang pada SOP ini kami melaksanankan pekerjaanya berdasarkan target kerja yang sesuai dengan tahapan kerjanya, apabila kinerja yang

berdasarkan stadar tersebut selesai, makan kami lakukan Evaluasi kerja untuk memanatau kinerja yang belum sesuai targetnya dan begitu setiap tahunya

Pariwisata merupakan salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam menggantikan sektor produksi lain dalam Negara penerima wisatawan.

E. KESIMPULAN

Faktor penyebab kurang berhasilnya hasil Implementasi Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan yaitu mempunyai empat indikasi masalah yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

1. Komunikasi

DISBUDPARPORA pada komuniksai pelaksanaan peraturan ini kurang optimal karena ketidak tahuan tentang peraturan daerah oleh kepala desa sutera pada peraturan daerah nomor 27 tahu 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang dilaksanakan oleh DISBUDPARPORA, sedangkan wisata

bahari pantai pulau datok ini merupakan wilayah wewenang.yaitu di sesa Sutera.

2. Sumber Daya

Sumber daya penempatan kasi Pariwisata sudah sesuai karena memiliki keahlian dalam bidangnya dan pengalamanya juga, sedangkan sumber daya finansialnya yaitu kurang memadai karena pembiayaan wisata yang ada di seluruh KKU maupun wisata bahari pantai pulau datok menggunakan APBD murni, apabila sumber daya manusia memadai atau mendukung tapi sumberdaya finansialnya tidak maka sebuah kebijak akan timpang, karena tidak ada biaya dalam pelaksanaanya.

3. Disposisi

komitmen yang dilakukan DISBUDPARPORA berdasarkan visi sebuah dinas, yang ingin mewujudkan wisata yang ada di KKU menjadi tujuan wisata dan bertarap internasioanl, tetapi wisata bahari pantai pulau datok ini dalam pengelolaanya memiliki kendala seperti kepemilikan lahan wisata yang masih dimiliki individu, dan pembiayaan wisata hanya mengandalkan APBD murni.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian

wewenag, hubungan antar unit-unitorganisasi. standar oprasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan, apa yang menjadi bidang tugasnya. Pada proses implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di DISBUDPARPORA

F. SARAN-SARAN/REKOMENDASI

- 1) Komunikasi yang dilakukan oleh DISBUDPARPORA kepariwisataan tidak hanya sebatas Kepala Dinas dan Kasi Pariwisata saja, tetapi libatkan aparatur daerah seperti kelurahan sutera .
- 2) Sumber Daya KKU sedangkan Sumber Daya finansial atau pembiayaan pada pelaksana sebuah kebijakan yang menggunakan APBD murni dilaksanakan oleh implementer dalam pembangunan wisata bahari pantai pulu datok dan mengupayakan bagaimana menarik investor agar menanamkan modal..
- 3) Disposisi Komitmen DISBUDPARPORA pada Wisata Bahari Pantai Pulau Datok menjadi wisata yang bertarap internasional dan agar Dinas-Dinas terkait

lain seperti Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKAD bisa ikut andil dalam pelaksanaan tersebut.

- 4) Struktur Birokrasi Dalam melaksanakan SOP (standar operasional prosedur), memberi keterangan atas kejelasan tentang alur proses kerja tanggung jawab dan staf terkait dalam proses kerja tersebut dan mempermudah birokrasi dalam mengetahui inefisiensi proses dalam satuan prosedur kerja.

G. REFERENSI

- Abidin. 2012 *Kebijakan Publik*, Jakarta: Selemba Humanika
- Agustino. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan*, Bandung : CV Alvabeta
- Indiahono. 2009, *Perbandingan Administrasi Publik Model Konsep dan Aplikasi* , Yogyakarta : GAVA MEDIA
- Jeddawi, 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta
- Mas'ud. 2013, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang, Universitas Muhammadiyah
- Morissan, 2013, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nogi, Hassel S, Tangkilisan. 2004 *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Public*, Yogyakarta YPAPI
- Nugroho. 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Pearce II, Jhon A dan Jr. Robinson, Richar B, 2009, *Manajemen Strategis:Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Edisi 10 Buku 1*, Jakarta: Penerbit Selemba Empat
- Parson, 2011, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik:konsep dan aplikasinya diIndonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Siagian. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono. 2005, *Analisis Kebijakan Publik , Kosp,Teori Dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Sugiyono. 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alvabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrai*, Bandung: Alvabeta
- Suharto. 2006, *Analisis Kebijakan Publik, jawa barat: Alvabeta*
- Satori. Komariah, 2011, *Metodologi Penelitan Kualitatif*, Bandung: alvabeta
- Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : ALPI
- Winarno. 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUR ARIPIIN
 NIM / Periode lulus : E0111062
 Tanggal Lulus : 08 April 2016
 Fakultas/ Jurusan : Isipol Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : Muranin@isipol@gmail.com / 089603272496

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publik*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Daerah No 27 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Kayong Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal Publika



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 15-06-2016

MUR ARIPIIN
 NIM. E0111062

catatan :
 tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)